

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI DESA CIKANDE PERMAI)

Zepanya Manurung<sup>1</sup>, Try Adhi Bangsawan<sup>2</sup>, Eli Apud Saepudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email : [zepanyamanurung16@gmail.com](mailto:zepanyamanurung16@gmail.com)

### Abstrak

Permasalahan sampah merupakan isu besar yang dihadapi di banyak lokasi, termasuk di Desa Cikande Permai, yang terletak di Kecamatan Cikande. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas sosial, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat pesat, sedangkan sistem pengelolaan sampah yang tersedia masih belum berfungsi secara efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi kebijakan No.3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan model George C. Edward III. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, merupakan teknik atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan berdasarkan Model Edward III yaitu terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya bebas dari hambatan, seperti minimnya komunikasi formal, kekurangan Sumber Daya Manusia serta fasilitas. Meski begitu, inisiatif warga dan partisipasi lokal mulai tumbuh. Disarankan adanya pelatihan teknis, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan ;Pengelolaan Sampah; Birokrasi

### Abstract

The waste problem is a big issue faced in many locations, including in Cikande Permai Village, which is located in Cikande District. With the increase in population and social activities, the volume of waste produced has also increased rapidly, while the available waste management system is still not functioning efficiently. The purpose of this research is to analyze the implementation of policy No. 3 of 2019 concerning Waste Management based on the George C. Edward III model. The qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation, is the research technique or method used in this study. The analysis was carried out based on the Edward III Model, which consisted of: communication, resources, executive disposition, and bureaucratic structure. This study shows that policy implementation is not completely free of obstacles, such as lack of formal communication, lack of human resources and facilities. Even so, citizen initiatives and local participation began to grow. It is recommended that there be technical training, institutional strengthening, and cross-sector coordination so that policy implementation can run more effectively and sustainably.

**Keywords:** Implementation of Waste Management ;P Policy; Bureaucracy

## PENDAHULUAN

Masalah lingkungan yang masih menjadi sorotan utama hingga pada saat ini adalah sampah. Sampah bersifat kronis, dimana ini berarti bahwa akan terus diproduksi seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia. Berbagai jenis sampah, mulai dari organik dan anorganik hingga berbahaya, telah meningkat sebagai akibat dari pergeseran gaya hidup masyarakat. Sampah dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan dan ancaman

kesehatan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Akibatnya, pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan menjadi sangat penting di banyak negara, termasuk Indonesia. (Purnama, 2015) menjelaskan bahwa apabila tidak dikelola dengan baik, sampah akan menimbulkan bau yang kurang sedap, menyebabkan banjir, serta menjadikan fasilitas umum sebagai sasaran pembuangan liar. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan sampah tidak bisa diabaikan.

Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia, yang dimana menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus mencakup dua komponen utama: pengurangan dan penanganan. Artinya, pengelolaan sampah, khususnya pada tahap pengumpulan dan pembuangan akhir, harus menjadi konsentrasi pemerintah. Namun, kebijakan lapangan ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal kelembagaan, teknis, dan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024) mencatat bahwa jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 34, 2 juta ton setiap tahunnya, dengan 40,26% di antaranya belum terkelola. Sisa makanan (39,25%) dan plastik (19,73%) merupakan komposisi terbesar, yang menjadikan Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah limbah plastik terbesar di dunia pada tahun 2019. Firman L. Sahwan dkk. (2010) dalam (Dermawan et al., 2018) menegaskan bahwa model pengelolaan sampah harus dilakukan dari awal hingga akhir agar bermanfaat secara ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Model ini bukan hanya sekedar mengurangi risiko pencemaran, melainkan juga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan keamanan lingkungan. Dengan kata lain, masyarakat akan mengubah cara mereka mengurangi, melakukan pengolahan dan memfungsikan kembali sampah melalui pengelolaan sampah yang terpadu. Pandangan ini membantu pemerintah daerah membuat rencana pengelolaan sampah yang baik.

Permasalahan yang sama juga terjadi di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemerintah kabupaten Serang menetapkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 sebagai aturan di tingkat daerah, supaya sistematis mengurangi dan menangani sampah. Namun, keberadaan regulasi tidak selalu menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan. (Wahab,

2015) menyebut bahwa implementasi kebijakan kerap kali terhambat oleh lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, maupun rendahnya dukungan masyarakat.

Kabupaten Serang sendiri menghadapi persoalan serius, dengan timbunan sampah mencapai 438 ribu ton per tahun atau sekitar 1,2 ribu ton per hari (KLHK, 2024). Kondisi ini menunjukkan tingginya beban sampah terhadap sistem pengelolaan daerah. Desa adalah pusat pelayanan publik, maka dari itu, penerapan kebijakan pengelolaan sampah sangat penting di tingkat desa. Desa adalah pusat pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di tingkat kabupaten hanya dapat dicapai jika desa berpartisipasi secara aktif. Sayangnya, desa masih menghadapi keterbatasan kelembagaan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sarana pendukung di banyak tempat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan seringkali tidak sesuai dengan peraturan.

Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, bahkan memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 6.077 jiwa per km<sup>2</sup> (Statistik & Serang, 2023), yang secara langsung meningkatkan produksi sampah rumah tangga. Hal ini menyebabkan keterbatasan prasarana, TPS yang overload, dan masih banyaknya pembuangan liar di ruang terbuka.

Pemerintah Desa Cikande Permai mengambil tindakan untuk mengajukan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) 3R kepada Pemerintah Kabupaten Serang sebagai contoh upaya pelaksanaan di tingkat desa. Sebagai upaya untuk mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kapasitas penanganan sampah Desa, usulan ini mencakup kebutuhan sepuluh kendaraan pengangkut sampah dan lahan seluas 1.000 meter persegi dikutip dari (Radar Banten, 2022)

Dalam kajian administrasi publik, menurut (Pasolong, 2019) keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis menggunakan model Edward III (1980). Empat variabel pokok yang ditekankan dalam model ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan. Menurut (Setyawan & Srihardjono, 2016), model Edward III relevan karena mampu menjelaskankomponen-komponen yang berdampak pada efektivitas implementasi, baik dari sisi struktur formal maupun kondisi sosial masyarakat.

Beberapa studi sebelumnya juga menunjukkan hambatan dalam implementasi pengelolaan sampah. (Novaldi et al., 2022) menemukan lemahnya sosialisasi dan koordinasi

antarperangkat desa di Kabupaten Serang. (Amelia, 2021) di Kota Batu menegaskan hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan lemahnya disposisi pelaksana. (Wijaya et al., 2022) di Kota Cimahi mengidentifikasi kurangnya komitmen pelaksana dan sarana prasarana. (Rohimah et al., 2023) di Kabupaten Poso menyoroti kurangnya fasilitas TPS dan minimnya partisipasi masyarakat. Berbagai temuan ini membuktikan bahwa persoalan implementasi kebijakan sampah merupakan fenomena umum di banyak daerah.

Dari pemaparan permasalahan yang telah dipaparkan, dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Desa Cikande Permai berdasarkan empat variabel model Edward III. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, sedangkan secara praktis dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2012: 06) dalam (Fitroni, 2018) memberikan definisi tentang pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut: "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara lengkap dan dengan deskripsi menggunakan kata-kata serta bahasa, dalam konteks alamiah tertentu dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami". Pemilihan metode ini karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Dalam penelitian ini, sumber terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi, sementara data sekunder bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, laporan instansi pemerintah, dan literatur akademik terkait. Menurut (Sugiono, 2019), kombinasi data primer dan sekunder penting untuk memperkuat analisis penelitian, karena mampu memberikan gambaran empiris sekaligus landasan teoritis. Teknik utama dalam pengumpulan data ialah wawancara mendalam yang dilakukan dengan aparat desa, petugas kebersihan, dan

masyarakat sebagai informan kunci. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan sampah serta dokumentasi terkait kebijakan.

Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah purposive sampling, yaitu dengan memilih informan secara selektif sesuai dengan pengetahuan, peran, dan keterlibatannya dalam implementasi kebijakan. Informan dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa mereka paling mengetahui isu yang menjadi fokus penelitian. Purposive sampling memungkinkan peneliti fokus pada informan yang dapat memberikan informasi kaya (information-rich cases) untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses pengumpulan data dilanjutkan dengan observasi lapangan. Observasi adalah teknik yang memungkinkan peneliti terlibat langsung dalam situasi sosial untuk mencatat fakta empiris. Dengan observasi, peneliti dapat membandingkan data hasil wawancara dengan kondisi nyata di lapangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) dalam (Suyitno, 2018), yang dilakukan melalui tiga tahapan analisis, meliputi reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Penggunaan model ini dianggap sesuai untuk penelitian kualitatif, sebab mendukung proses pengorganisasian data secara terstruktur dan terus menerus sampai ditemukan kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode sebagai upaya menjaga keabsahan data. Menurut Denzin (1978), triangulasi merupakan strategi pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, dan teori. Melalui penerapan triangulasi, hasil penelitian menjadi lebih kredibel serta memiliki dasar pertanggungjawaban ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Cikande Permai**

Pada bagian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Desa Cikande Permai dengan menggunakan pendekatan George Edward III yang dielaborasi dengan temuan penelitian di lapangan.

#### 1. Komunikasi

Untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan, komunikasi sangat penting. Dalam konteks teori

implementasi (George C. Edward III, 1980) , komunikasi merupakan hal yang penting untuk menjamin bahwa baik pelaksana maupun masyarakat memahami dan menerapkan kebijakan pemerintah dengan benar. Penyampaian informasi, kejelasan isi kebijakan, dan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan cara pengelolaan sampah adalah semua contoh proses komunikasi.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan, jalur komunikasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Kepala desa hanya menyampaikan informasi kebijakan kepada perangkat di bawahnya secara sporadis tanpa menggunakan alat komunikasi seperti pamflet, surat edaran, atau papan informasi. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak memahami kebijakan, langkah-langkah teknis untuk mengelola sampah, dan sanksi yang berlaku. Ini secara langsung menunjukkan bahwa warga kurang terlibat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah.

Selain itu, kondisi komunikasi menjadi lebih buruk karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada desa. Aparatur desa menggunakan Perda sebagai referensi, tetapi tidak ada pedoman teknis atau petunjuk implementasi yang konsisten. Dalam kebanyakan kasus, komunikasi antara desa dan Dinas Lingkungan Hidup bersifat situasional dan informal, dan hanya terjadi ketika muncul masalah teknis. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan dari tingkat pemerintah daerah ke tingkat desa tidak terstruktur.

Keadaan ini menunjukkan bahwa standar komunikasi yang ditetapkan oleh Edward III, yaitu kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan informasi, belum dipenuhi secara menyeluruh. Menurut Wahab (2012), kegagalan komunikasi akan menyebabkan pemahaman yang buruk dan keterlibatan masyarakat yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novaldi, Budiati, dan Arenawati (2022), sosialisasi yang lemah menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang tidak efektif. Demikian pula, Latundo, Pandipa, dan Akib (2023) menemukan bahwa ketidakmampuan untuk berkomunikasi tentang kebijakan menyebabkan orang-orang di Poso terus membuang sampah sembarangan.

## 2. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan publik, seperti Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan, sangat bergantung pada ketersediaan sumber

daya. Edward III (1980) menyatakan bahwa meskipun konten kebijakan jelas dan komunikasi disampaikan dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan akan sulit mencapai efektivitas. Sumber daya tersebut mencakup aspek personel, fasilitas, dan kemampuan masyarakat untuk mendukung jalannya kebijakan.

Hasil penelitian di Desa Cikande Permai menunjukkan bahwa ada hanya dua petugas kebersihan di setiap wilayah Rukun Warga (RW). Mengumpulkan dan membawa sampah rumah tangga menuju TPS adalah tugas petugas ini. Meskipun jumlah tersebut dianggap cukup bagi sebagian wilayah, masih ada keluhan masyarakat tentang keterlambatan pengangkutan sampah karena jadwal yang tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas petugas tidak seimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Selain keterbatasan jumlah personel, fasilitas juga kekurangan sumber daya. Sistem pemilahan sampah tidak efisien karena tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik hampir tidak ada di tingkat rumah tangga. Mayoritas petugas hanya memilah sampah plastik secara sederhana sebelum dibuang ke TPS, mengutamakan keuntungan daripada prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kebijakan pengelolaan persampahan masih memerlukan dukungan sarana prasarana.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa elemen sumber daya masih menghadapi masalah besar dalam menerapkan kebijakan pengelolaan sampah di Desa Cikande Permai. Faktor penghambat utama termasuk jumlah personel yang terbatas, fasilitas pemilahan yang terbatas, dan kurangnya pelatihan teknis bagi staf. Penelitian ini selaras dengan studi dari Novaldi, Budiati, Arenawati (2022) yang menunjukkan bahwa kurnagnya dukungan sarana prasarana dan minimnya sumber daya manusia menjadi faktor penghambat utama pelaksanaan kebijakan persampahan. Maka dari itu, keberhasilan pengimplementasian kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan; sumber daya manusia yang berpengalaman, sarana prasarana yang memadai, dan dukungan sistem secara konsisten juga penting.

### 3. Disposisi

Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Cikande Permai, anggota staf desa dan petugas kebersihan memiliki sikap yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan. Mereka rutin melakukan pengangkutan sampah dan beroperasi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2019. Disposisi masyarakat masih merupakan hambatan besar. Orang-orang masih tidak terbiasa memilah sampah.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara aparatur dan masyarakat tidak konsisten. Sementara masyarakat tidak memiliki kesadaran kolektif untuk berpartisipasi secara aktif, aparatur desa berusaha menjalankan kebijakan dengan keterbatasan mereka. Kondisi ini selaras dengan hasil Amelia (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat yang rendah menjadi faktor utama yang menyebabkan kebijakan persampahan tidak dijalankan di Kota Batu.

Maka sebab itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan di Desa Cikande Permai masih belum seragam. Sikap positif aparat desa dan petugas kebersihan belum diimbangi oleh partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat aspek disposisi, diperlukan edukasi berkelanjutan yang menumbuhkan kesadaran warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah, serta insentif dan sanksi yang jelas agar masyarakat memiliki dorongan lebih kuat untuk terlibat aktif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peran sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sejauh mana struktur birokrasi mendukung pelaksanaan kebijakan melalui pembagian tugas yang jelas, alur koordinasi yang teratur, dan mekanisme pengawasan yang konsisten. Tanpa adanya struktur birokrasi yang efektif, kebijakan yang sudah baik di atas kertas seringkali gagal di lapangan.

Hasil penelitian di Desa Cikande Permai menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum untuk pengelolaan sampah secara struktural. Perangkat desa, ketua RW, dan ketua RT membantu kepala desa mengatur kegiatan pengelolaan sampah di daerah mereka masing-masing. Kepala desa bertindak sebagai pihak utama yang mengatur kebijakan lokal. Meskipun demikian, ada mekanisme koordinasi antarinstansi, terutama antara

desa dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, yang masih bersifat informal dan terjadi hanya saat ada masalah teknis.

Selain itu, kekurangan mekanisme pengawasan menunjukkan kelemahan struktur birokrasi. Tidak ada forum khusus atau evaluasi rutin untuk meninjau pelaksanaan kebijakan, yang membuat implementasi sangat bergantung pada upaya pemerintah desa. Akibatnya, kualitas pengelolaan sampah di seluruh wilayah RW sangat berbeda, karena beberapa wilayah sudah memiliki sistem yang lebih terorganisir, sementara yang lain masih menggunakan metode lama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada aturan umum yang diterapkan di seluruh desa.

Temuan tersebut sesuai dengan penelitian dari Hardani Wijaya dkk. (2022) yang menemukan bahwa kurangnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan kebijakan persampahan di Kota Cimahi. Penelitian serupa juga dilaporkan oleh Novaldi, Budiati, dan Arenawati (2022) yang menekankan bahwa struktur birokrasi yang tidak stabil menyebabkan kebijakan hanya berjalan sebatas formalitas tanpa diimplementasikan dengan baik di tingkat masyarakat.

Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Cikande Permai sebagian besar mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memberikan Rukun Warga (RW) untuk menangani pengelolaan lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2019 menetapkan prinsip partisipasi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah dalam kebijakan ini. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi masalah besar. Ini terutama berlaku untuk teori implementasi George C. Edward III, yang menekankan betapa pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dari segi komunikasi, ada perbedaan besar antara pemahaman pemerintah daerah tentang kebijakan normatif yang dibuat di tingkat desa dan RW. Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2019 belum dilakukan secara sistematis. Baik aparat desa maupun RW mengakui bahwa tidak ada instruksi, pedoman tertulis, atau forum diskusi publik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memahami proses, tanggung jawab, dan keuntungan pengelolaan sampah berbasis peraturan.

Kelemahan sumber daya juga cukup menonjol. Tanpa fasilitas pendukung dan pelatihan teknis yang memadai, sebagian besar RW hanya memiliki dua petugas pengangkut sampah.

Sistem pemilahan sulit diterapkan karena tidak ada sarana seperti tempat sampah terpilah. Akhirnya, kebijakan dijalankan secara konvensional tanpa inovasi atau peningkatan kapasitas SDM. Ini sejalan dengan gagasan Edward III keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi langsung oleh ketersediaan sumber daya yang terbatas.

Aspek disposisi pelaksana menunjukkan variasi. Meskipun beberapa petugas mendukung ide pengelolaan berbasis pemilahan, mereka terbebani oleh waktu yang terbatas, fasilitas yang terbatas, dan kompensasi yang tidak sebanding dengan beban kerja mereka. Beberapa orang bahkan menentang sistem baru karena mereka pikir metode pengangkutan yang tetap mencampur sampah mengganggu upaya masyarakat untuk memilah sampah. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana dipengaruhi oleh insentif struktural dan kesiapan sistem, bukan hanya oleh keinginan pribadi.

Struktur birokrasi adalah hambatan terbesar untuk dilaksanakan. Tidak ada pedoman teknis atau kolaborasi yang jelas dari desa atau dinas terkait, dan RW mengelola sampah secara mandiri. Ketidakterpaduan antar-RW menyebabkan perbedaan layanan; beberapa RW memiliki sistem pengangkutan dan bank sampah yang teratur, sementara lainnya masih bergantung pada pembakaran individu atau bahkan tidak memiliki TPS. Implementasi kebijakan tergantung pada upaya lokal semata karena tidak ada struktur formal, mekanisme koordinasi, dan sistem pelaporan yang konsisten.

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah Desa Cikande Permai belum sepenuhnya mengikuti prinsip tata kelola yang efisien dan berkelanjutan. Inisiatif lokal lebih banyak mempengaruhi keberhasilan daripada sistem kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas birokrasi di tingkat RW, pelatihan teknis, penyediaan fasilitas logistik, dan pembentukan forum koordinasi antar-RW. Tanpa tindakan konkret, implementasi kebijakan akan tetap bergantung pada keswadayaan masyarakat dan tidak akan memiliki dampak jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan di Desa Cikande Permai masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat pelaksanaannya belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis dengan model Edward III, ditemukan bahwa aspek komunikasi belum efektif karena sosialisasi kebijakan

tidak dilakukan secara sistematis, sehingga masyarakat kurang memahami isi dan tujuan kebijakan.

Dari sisi sumber daya, jumlah petugas kebersihan relatif terbatas dan fasilitas penunjang seperti tempat sampah terpilah masih minim. Kondisi ini menyebabkan proses pemilahan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aspek disposisi menunjukkan bahwa aparat desa dan petugas lapangan memiliki komitmen cukup baik, tetapi kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam hal memilah sampah dan membayar iuran kebersihan.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang belum terbangun secara formal dan berkelanjutan. Tidak adanya pedoman teknis yang seragam serta lemahnya mekanisme pengawasan membuat implementasi kebijakan bergantung pada inisiatif lokal di tingkat desa dan RW.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Cikande Permai memerlukan penguatan di keempat aspek tersebut. Pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi melalui sosialisasi berjenjang, menambah sumber daya manusia dan fasilitas pendukung, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan insentif, serta membangun struktur birokrasi yang lebih solid dengan koordinasi dan pengawasan yang sejalan. Tahapan-tahapan ini memiliki peran penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai tujuan kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N. D. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185715/>
- Dermawan, D., Lahming, L., & S. Mandra, M. A. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(3), 86. <https://doi.org/10.26858/uej.v1i3.8074>
- Fitroni, T. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMONGAN (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan hidup). *Skripsi*, 1.
- George C. Edward III. (1980). Implementing Public Policy. In Robert L Peabody (Ed.), *Congressional Quarterly Press*. Congressional Quarterly INC. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-86>
- KLHK. (2024). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Novaldi, M. F. S., Budiati, A., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang. *JDKP Jurnal*

- Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 437–457.  
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i2.5908>
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik (IX)*. ALFABETA, cv.
- Pemerintah Kabupaten Serang. (2019). *Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan*
- Purnama, S. G. (2015). Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Vektor. *Universitas Udayana*, 3–16. [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id)
- Radar Banten. (2022). *Cikande Permai Ajukan Pembangunan TPST 3R*. Radar Banten TV. [https://www.radarbanten.co.id/2022/10/18/cikande-permai-ajukan-pembangunan-tpst-3r/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.radarbanten.co.id/2022/10/18/cikande-permai-ajukan-pembangunan-tpst-3r/?utm_source=chatgpt.com)
- Rohimah, N., Khalid, A., & Pandipa, H. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Watuawu Kecamatan Lage Kabupaten Poso*. 20(1), 1–7.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133.  
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Statistik, B. P., & Serang, K. (2023). *CIKANDE*.
- Sugiono, P. D. (2019). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (p. 12).
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. In *Akademia Pustaka*.
- Wahab, S. Abdul. (2015). *Prof. Dr H. Solichin Abdul Wahab. M.A.*
- Wijaya, H., Nurasa, H., & Susanti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 341. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38130>